



Department of Digital Business

Journal of Artificial Intelligence and Digital Business (RIGGS)

Homepage: <https://journal.ilmudata.co.id/index.php/RIGGS>

Vol. 5 No. 2 (2026) pp: 15803- 15810

P-ISSN: 2963-9298, e-ISSN: 2963-914X

Transformasi Digital dan Reproduksi Ketimpangan Sosial Ekonomi di Indonesia: Perspektif Sosiologi Ekonomi

Aulia Febri Khairani¹, Hulwati², Duhriah³

¹Mahasiswa Magister Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Imam Bonjol Padang

²Dosen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang

³Dosen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang

¹aulia.febri.khairani@uinib.ac.id ²hulwati@uinib.ac.id ³duhriah@gmail.com

Abstrak

Transformasi digital telah membawa perubahan yang signifikan dalam kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat Indonesia. Perkembangan teknologi digital tidak hanya mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis digital, tetapi juga memengaruhi pola interaksi sosial, struktur pekerjaan, serta distribusi akses ekonomi dalam masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana transformasi digital mereproduksi ketimpangan sosial-ekonomi di Indonesia dalam perspektif sosiologi ekonomi. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif analisis melalui studi kepustakaan (library research). Data penelitian diperoleh dari berbagai sumber ilmiah, seperti jurnal, buku, artikel akademik, laporan penelitian, serta data resmi dari Badan Pusat Statistik (BPS) dan Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII). Analisis data dilakukan melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan secara sistematis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa transformasi digital memberikan dampak yang bersifat dualistik. Di satu sisi, digitalisasi mampu membuka peluang ekonomi baru melalui perkembangan e-commerce, financial technology (fintech), dan ekonomi platform yang meningkatkan efisiensi serta produktivitas masyarakat. Namun, di sisi lain, transformasi digital juga berpotensi memperkuat reproduksi ketimpangan sosial-ekonomi akibat adanya kesenjangan akses teknologi, rendahnya literasi digital, dan ketidakmerataan infrastruktur digital antara wilayah perkotaan dan pedesaan. Dalam perspektif sosiologi ekonomi, kondisi tersebut menunjukkan bahwa teknologi digital tidak bersifat netral, melainkan turut memengaruhi distribusi kekuasaan, akses sumber daya, dan stratifikasi sosial dalam masyarakat. Oleh karena itu, pembangunan digital di Indonesia perlu diarahkan pada prinsip inklusivitas, pemerataan akses teknologi, dan keadilan sosial agar transformasi digital dapat menciptakan pembangunan sosial-ekonomi yang lebih berkelanjutan dan merata.

Kata Kunci: Transformasi Digital, Ketimpangan Sosial-Ekonomi, Sosiologi Ekonomi, Pembangunan Inklusif, Digitalisasi.

1. Latar Belakang

Transformasi digital telah menjadi fenomena global yang mengubah berbagai aspek kehidupan masyarakat, termasuk bidang ekonomi, sosial, budaya, dan pola interaksi sosial. Perkembangan internet, kecerdasan buatan (*artificial intelligence*), media sosial, serta platform ekonomi digital telah mendorong perubahan besar dalam sistem ekonomi modern. Di Indonesia, perkembangan teknologi digital berjalan sangat pesat seiring meningkatnya penggunaan internet dan perangkat digital dalam aktivitas sehari-hari masyarakat. Kehadiran *e-commerce*, *financial technology (fintech)*, *marketplace*, serta layanan berbasis aplikasi telah menciptakan pola ekonomi baru yang lebih fleksibel, cepat, dan berbasis jaringan digital. Transformasi tersebut menunjukkan bahwa teknologi digital telah menjadi bagian penting dalam dinamika kehidupan sosial-ekonomi masyarakat modern (Hisyam & Lubis, 2024).

Dalam perspektif sosiologi ekonomi, digitalisasi tidak hanya dipahami sebagai perkembangan teknologi semata, tetapi juga sebagai proses perubahan struktur sosial yang memengaruhi relasi ekonomi, pola konsumsi, stratifikasi sosial, serta distribusi sumber daya dalam masyarakat. Teknologi digital telah mengubah cara masyarakat bekerja, berinteraksi, dan membangun hubungan sosial-ekonomi. Perubahan tersebut melahirkan masyarakat digital yang sangat bergantung pada akses informasi dan kemampuan teknologi sebagai modal sosial baru dalam kehidupan modern. Kehadiran teknologi digital juga menciptakan pola hubungan sosial baru yang semakin terhubung melalui ruang virtual tanpa batas geografis (Yunita, S., & Harahap, 2021).

Perkembangan ekonomi digital di Indonesia menunjukkan tren yang sangat signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Indonesia bahkan menjadi salah satu negara dengan pertumbuhan ekonomi digital terbesar di kawasan Asia Tenggara. Berdasarkan laporan Google, Temasek, dan Bain & Company, nilai ekonomi digital Indonesia diproyeksikan terus meningkat seiring pertumbuhan transaksi digital, penggunaan layanan keuangan digital, dan aktivitas perdagangan elektronik masyarakat. Kondisi ini memperlihatkan bahwa transformasi digital telah membuka peluang ekonomi baru, terutama bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang mulai memanfaatkan platform digital untuk memperluas pasar dan meningkatkan produktivitas usaha (Kristyanto, V. S., & Jamil, 2023).

Di sisi lain, transformasi digital juga menghadirkan persoalan sosial baru berupa ketimpangan akses teknologi atau *digital divide*. Kelompok masyarakat yang memiliki akses internet, literasi digital, dan kemampuan teknologi yang memadai cenderung memperoleh manfaat ekonomi lebih besar dibandingkan kelompok masyarakat yang memiliki keterbatasan akses digital. Kondisi tersebut menyebabkan digitalisasi tidak hanya menciptakan peluang ekonomi, tetapi juga mereproduksi ketimpangan sosial-ekonomi dalam masyarakat. Ketimpangan digital terlihat dari perbedaan akses teknologi antara wilayah perkotaan dan pedesaan, kelompok ekonomi atas dan bawah, serta perbedaan tingkat pendidikan masyarakat. Akibatnya, transformasi digital cenderung memperkuat stratifikasi sosial baru berbasis penguasaan teknologi dan akses informasi (Muharrar & Wulandari, 2025).

Selain memengaruhi struktur sosial masyarakat, digitalisasi juga mengubah pola hubungan kerja dan struktur ekonomi masyarakat modern. Kemunculan ekonomi platform melalui layanan transportasi online, *marketplace*, dan *gig economy* telah menciptakan jenis pekerjaan baru yang lebih fleksibel. Masyarakat kini tidak lagi bergantung sepenuhnya pada pekerjaan formal karena teknologi digital membuka peluang pekerjaan berbasis jaringan internet seperti *freelancer*, *content creator*, *affiliate marketing*, dan pelaku bisnis daring. Namun, perubahan tersebut juga memunculkan ketidakpastian pendapatan dan kerentanan kerja bagi pekerja digital akibat ketergantungan pada sistem algoritma platform digital. Fenomena ini menunjukkan bahwa transformasi digital membawa dampak yang bersifat dualistik, yakni membuka peluang pertumbuhan ekonomi sekaligus memperbesar risiko ketidakadilan sosial dalam masyarakat modern (Zair, I. O., Syobah, N. S., & Inayah, 2025).

Perkembangan transformasi digital di Indonesia mengalami peningkatan yang sangat signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Berdasarkan hasil survei Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) tahun 2024, jumlah pengguna internet di Indonesia mencapai 221,5 juta jiwa atau sekitar 79,5% dari total populasi nasional (News, 2024). Angka tersebut menunjukkan peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya dan memperlihatkan bahwa internet telah menjadi kebutuhan utama masyarakat dalam aktivitas ekonomi maupun sosial. Namun demikian, peningkatan penetrasi internet tersebut belum sepenuhnya merata antarwilayah. Kawasan perkotaan, khususnya Pulau Jawa, masih mendominasi akses internet dibandingkan wilayah pedesaan dan kawasan timur Indonesia. Kondisi ini menunjukkan bahwa transformasi digital belum sepenuhnya menciptakan pemerataan akses ekonomi digital di Indonesia.

Data Badan Pusat Statistik (BPS) juga menunjukkan adanya kesenjangan akses teknologi informasi antara masyarakat perkotaan dan pedesaan. Persentase rumah tangga yang memiliki akses internet di wilayah perkotaan masih lebih tinggi dibandingkan wilayah rural, terutama di kawasan timur Indonesia yang masih mengalami keterbatasan infrastruktur digital. Ketimpangan tersebut menyebabkan manfaat ekonomi digital lebih banyak dinikmati kelompok masyarakat urban yang memiliki akses teknologi lebih baik. Dalam perspektif sosiologi ekonomi, kondisi ini memperlihatkan bahwa teknologi digital dapat menjadi instrumen reproduksi kekuasaan ekonomi yang memperkuat ketimpangan sosial apabila tidak diimbangi dengan kebijakan pemerataan akses digital (BPS, 2024).

Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa transformasi digital memiliki hubungan erat dengan perubahan struktur sosial dan ketimpangan ekonomi masyarakat. Penelitian Hisyam dan Lubis (2024) menjelaskan bahwa perkembangan ekonomi digital melalui platform online telah mengubah pola relasi ekonomi masyarakat dan menciptakan bentuk interaksi sosial baru berbasis teknologi digital. Sementara itu, penelitian Muharrar dan Wulandari (2025) menemukan bahwa transformasi digital di wilayah perkotaan Indonesia cenderung mereproduksi ketimpangan sosial-ekonomi akibat perbedaan akses teknologi dan penguasaan informasi digital. Penelitian lain yang dilakukan oleh Asep Koswara (2024) juga menunjukkan bahwa ketimpangan infrastruktur digital antara wilayah perkotaan dan pedesaan menjadi faktor utama yang

memperlebar kesenjangan ekonomi masyarakat di Indonesia. Temuan-temuan tersebut memperlihatkan bahwa digitalisasi tidak selalu menghasilkan pemerataan ekonomi, tetapi juga berpotensi memperkuat stratifikasi sosial baru dalam masyarakat modern.

Meskipun berbagai penelitian mengenai transformasi digital dan ekonomi digital telah banyak dilakukan, sebagian besar penelitian sebelumnya masih berfokus pada aspek perkembangan teknologi, pertumbuhan ekonomi digital, dan efektivitas platform digital dalam meningkatkan produktivitas ekonomi masyarakat. Kajian yang secara khusus menganalisis bagaimana transformasi digital mereproduksi ketimpangan sosial-ekonomi dalam perspektif sosiologi ekonomi masih relatif terbatas, terutama dalam konteks masyarakat Indonesia. Oleh karena itu, penelitian ini penting dilakukan untuk menganalisis transformasi digital tidak hanya sebagai fenomena teknologi, tetapi juga sebagai proses sosial yang memengaruhi relasi kekuasaan, stratifikasi sosial, dan distribusi sumber daya ekonomi dalam masyarakat. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dalam pengembangan kajian sosiologi ekonomi di era digital sekaligus menjadi bahan pertimbangan dalam perumusan kebijakan transformasi digital yang lebih inklusif dan berkeadilan sosial.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif analisis. Pendekatan tersebut dipilih karena penelitian bertujuan untuk mengkaji dan memahami fenomena sosial yang bersifat kompleks, khususnya mengenai dampak transformasi digital terhadap pembangunan sosial ditinjau dari perspektif masyarakat. Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan menelaah berbagai sumber ilmiah, seperti buku, jurnal, artikel akademik, serta laporan penelitian yang berkaitan dengan digitalisasi, pembangunan sosial, dan teori-teori dalam kajian sosiologi pembangunan.

Proses analisis data dilakukan secara sistematis melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Peneliti kemudian menginterpretasikan berbagai temuan berdasarkan teori-teori sosiologi, seperti teori modernisasi, teori ketergantungan, dan teori perubahan sosial. Melalui pendekatan ini, penelitian diharapkan mampu memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai bagaimana digitalisasi memengaruhi dinamika pembangunan sosial di Indonesia, sekaligus menawarkan perspektif sosiologis dalam menghadapi berbagai tantangan pada era perkembangan teknologi digital.

3. Hasil dan Diskusi

a. Transformasi Digital dan Perubahan Struktur Sosial

Transformasi digital merupakan proses perubahan masyarakat akibat perkembangan teknologi digital yang memengaruhi hampir seluruh aspek kehidupan, mulai dari ekonomi, pendidikan, komunikasi, hingga budaya. Kehadiran internet, media sosial, kecerdasan buatan, dan platform digital telah mengubah cara manusia bekerja, berinteraksi, dan membangun hubungan sosial. Dalam perspektif sosiologi ekonomi, transformasi digital tidak hanya dipahami sebagai perkembangan teknologi semata, tetapi juga sebagai perubahan struktur sosial yang memengaruhi pola kekuasaan, stratifikasi sosial, serta hubungan antarindividu dalam masyarakat.

Perubahan struktur sosial akibat digitalisasi terlihat dari bergesernya pola interaksi masyarakat dari hubungan langsung menuju hubungan virtual berbasis jaringan internet. Dahulu, interaksi sosial banyak dilakukan secara tatap muka dalam ruang fisik, sedangkan saat ini komunikasi dapat dilakukan secara cepat melalui media digital seperti WhatsApp, Instagram, TikTok, dan berbagai platform lainnya. Kondisi ini menciptakan masyarakat digital yang lebih terkoneksi tanpa batas ruang dan waktu. Menurut penelitian tentang masyarakat digital, teknologi telah menjadi agen perubahan sosial yang mampu membentuk budaya dan identitas baru dalam masyarakat modern (Hisyam & Lubis, 2024).

Transformasi digital juga mengubah struktur ekonomi masyarakat. Kehadiran platform digital seperti marketplace, layanan transportasi online, dan ekonomi berbasis aplikasi menciptakan pola kerja baru yang lebih fleksibel. Masyarakat kini tidak lagi bergantung sepenuhnya pada pekerjaan formal, karena teknologi membuka peluang pekerjaan digital seperti content creator, freelancer, driver online, affiliate marketing, dan bisnis online. Dalam kajian sosiologi ekonomi, perubahan ini menunjukkan adanya pergeseran dari ekonomi konvensional menuju ekonomi digital yang berbasis jaringan dan teknologi informasi (Muharrar & Wulandari, 2025).

Namun, transformasi digital tidak selalu menghasilkan dampak positif bagi seluruh masyarakat. Perubahan ini juga melahirkan ketimpangan sosial baru yang dikenal sebagai digital divide atau kesenjangan digital. Kelompok masyarakat yang memiliki akses internet, pendidikan, dan kemampuan teknologi akan lebih mudah memperoleh peluang ekonomi dibandingkan masyarakat yang tidak memiliki akses digital yang memadai. Akibatnya, terjadi reproduksi ketimpangan sosial antara kelompok yang “melek digital” dengan kelompok yang tertinggal secara teknologi. Penelitian mengenai ketimpangan digital di Indonesia menunjukkan bahwa transformasi digital sering kali memperkuat perbedaan kelas sosial, terutama di wilayah perkotaan dan pedesaan (Don et al., 2024).

Selain itu, struktur sosial masyarakat juga mengalami perubahan dalam pola relasi dan status sosial. Pada era digital, status sosial tidak hanya ditentukan oleh kekayaan atau jabatan formal, tetapi juga oleh pengaruh digital seperti jumlah pengikut media sosial, kemampuan membangun personal branding, dan penguasaan teknologi informasi. Munculnya influencer, kreator digital, dan pelaku ekonomi kreatif menunjukkan bahwa media digital mampu membentuk kelas sosial baru dalam masyarakat. Dalam masyarakat digital, individu yang memiliki akses terhadap informasi dan jaringan online cenderung memiliki posisi sosial yang lebih kuat dibandingkan mereka yang tidak terhubung dengan teknologi digital (Muhammad Kamil Jafar N, 2022).

Transformasi digital juga memengaruhi nilai dan budaya sosial masyarakat. Budaya konsumsi menjadi semakin cepat dan instan karena masyarakat terbiasa dengan layanan digital yang praktis. Misalnya, kebiasaan berbelanja online, penggunaan dompet digital, serta budaya konsumsi berbasis tren media sosial telah mengubah perilaku ekonomi masyarakat. Teknologi digital menciptakan budaya baru yang lebih individualis, cepat, dan berbasis visual. Dalam konteks ini, media sosial tidak hanya menjadi alat komunikasi, tetapi juga sarana pembentukan opini, gaya hidup, bahkan identitas sosial masyarakat modern (Ahmad taufik, 2025).

Di sisi lain, transformasi digital turut membawa tantangan terhadap hubungan sosial tradisional. Interaksi virtual yang semakin dominan menyebabkan berkurangnya komunikasi langsung dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini dapat memengaruhi solidaritas sosial, nilai kebersamaan, dan kualitas hubungan interpersonal dalam masyarakat. Meski demikian, teknologi digital juga dapat memperkuat solidaritas sosial melalui komunitas online, gerakan sosial digital, dan penyebaran informasi yang cepat dalam situasi tertentu, seperti bencana atau krisis sosial.

Dengan demikian, transformasi digital telah membawa perubahan besar terhadap struktur sosial masyarakat. Digitalisasi tidak hanya mengubah cara manusia menggunakan teknologi, tetapi juga membentuk pola interaksi, hubungan ekonomi, stratifikasi sosial, serta budaya masyarakat modern. Oleh karena itu, diperlukan kemampuan adaptasi, peningkatan literasi digital, dan kebijakan yang inklusif agar transformasi digital dapat memberikan manfaat yang merata bagi seluruh lapisan masyarakat.

b. Hubungan Antara Teknologi Digital dan Dinamika Sosiologi Ekonomi

Teknologi digital telah mengubah dinamika sosiologi ekonomi dengan menciptakan interaksi baru antara struktur sosial, pola produksi, dan distribusi kekayaan di masyarakat. Hubungan ini tidak hanya bersifat teknis, melainkan juga membentuk ulang relasi sosial-ekonomi melalui platform digital yang memengaruhi perilaku konsumen, stratifikasi kelas, dan mobilitas sosial.

Teknologi digital merevolusi sosiologi ekonomi dengan menggeser paradigma dari ekonomi tradisional berbasis fisik ke ekonomi platform yang beroperasi di ruang virtual, di mana algoritma menjadi penentu utama alokasi sumber daya dan peluang ekonomi (Wibowo, G. A., Hanna, Ruhana, F., Arif, F. M., 2023). Proses ini memicu perubahan sosial mendalam, seperti munculnya "masyarakat digital" di mana interaksi ekonomi tidak lagi terikat oleh batas geografis, melainkan oleh akses data dan literasi teknologi (Yunita, S., & Harahap, 2021). Misalnya, platform e-commerce seperti Tokopedia dan Shopee di Indonesia telah mengubah pola konsumsi masyarakat dari pasar tradisional ke transaksi online, yang selain meningkatkan efisiensi, juga menciptakan lapangan kerja baru bagi freelancer dan UMKM digital. Namun, dinamika ini juga menimbulkan fragmentasi sosial, di mana kelompok urban dengan akses internet tinggi mendominasi manfaat ekonomi, sementara masyarakat rural tertinggal dalam kesenjangan digital yang memperlebar jurang kemiskinan (Nur Afifah Azzahra, 2024).

Dalam perspektif sosiologi ekonomi, teknologi digital berfungsi sebagai agen transformasi yang mereproduksi struktur kekuasaan melalui kontrol data; perusahaan teknologi besar seperti Google dan Meta mengumpulkan big data untuk memprediksi perilaku konsumen, sehingga membentuk preferensi ekonomi secara algoritmik. Hal ini mengubah dinamika kelas sosial, di mana "proletar digital" (pekerja *gig economy* seperti driver ojek online) menghadapi eksploitasi baru berupa ketidakpastian pendapatan dan ketergantungan pada rating platform (Zair et al, 2025). Penelitian menunjukkan bahwa digitalisasi mempercepat mobilitas sosial vertikal bagi individu berpendidikan tinggi, tetapi justru memperkuat stratifikasi horizontal bagi kelompok marginal, seperti perempuan di pedesaan yang kesulitan mengakses pelatihan digital. Di Indonesia, pertumbuhan ekonomi digital mencapai 20% per tahun sejak 2020, didorong oleh penetrasi smartphone, namun ini disertai peningkatan pengangguran terselubung akibat otomatisasi pekerjaan manusia (Aryani et al., 2025).

Lebih lanjut, hubungan ini memengaruhi norma budaya ekonomi, di mana nilai-nilai konsumsi bergeser dari kepemilikan barang ke akses layanan (*sharing economy*) (Ayu, I. W., Zulkarnaen, Z., & Fitriyanto, 2022), menciptakan solidaritas digital berbasis komunitas online tapi erosi ikatan sosial lokal. Sosiologi ekonomi seperti Castells dalam teori "*network society*" menjelaskan bahwa teknologi digital membentuk jaringan global yang fluid, memungkinkan inklusi ekonomi bagi diaspora melalui remitansi digital, tetapi juga memicu krisis identitas di tengah homogenisasi budaya konsumsi. Tantangan utama adalah digital divide, di mana 40% populasi Indonesia masih offline pada 2025, menghambat pemerataan pembangunan dan memperburuk ketimpangan Gini ratio (Sudiantini et al, 2023). Pemerintah melalui program Kartu Prakerja dan infrastruktur 5G berupaya mengatasi ini, namun keberhasilan bergantung pada peningkatan literasi digital yang merata untuk mencegah polarisasi sosial-ekonomi.

Secara keseluruhan, dinamika sosiologi ekonomi di era digital bersifat dialektis: inovasi teknologi mendorong pertumbuhan inklusif sekaligus memperdalam ketidakadilan struktural, menuntut kebijakan adaptif yang mengintegrasikan aspek sosial dalam pengembangan teknologi. Transformasi ini tidak hanya mengubah distribusi kekayaan, tapi juga rekonstruksi identitas ekonomi masyarakat, di mana individu menjadi "produser" (*prosumers*) yang secara simultan memproduksi dan mengonsumsi nilai melalui konten *user-generated*. Di masa depan, keseimbangan antara inovasi digital dan kohesi sosial akan menentukan keberlanjutan pembangunan ekonomi berkelanjutan (Suseno, J., Asyhari, H., & Saputra, 2025).

c. Digitalisasi Dan Kesenjangan Ekonomi Masyarakat

Digitalisasi membawa kemajuan ekonomi sekaligus memperlebar jurang kemiskinan di kalangan masyarakat, terutama di negara berkembang seperti Indonesia. Proses ini sering kali menguntungkan kelompok berakses tinggi, sementara yang lain tertinggal, menciptakan ketimpangan baru yang sulit diatasi (HUDA, 2025). Selain itu, ketersediaan infrastruktur digital di Indonesia masih menunjukkan ketimpangan yang cukup besar antara kawasan perkotaan dan pedesaan. Berdasarkan data Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), tingkat akses internet di wilayah Pulau Jawa telah mencapai sekitar 75%, sedangkan di Papua baru berada pada kisaran 35%. Perbedaan tersebut menyebabkan masyarakat di daerah pedesaan mengalami keterbatasan dalam memanfaatkan berbagai peluang ekonomi digital, sehingga kondisi ini turut memperlebar kesenjangan pendapatan antara masyarakat perkotaan dan pedesaan (Kominfo, 2022).

Di tengah maraknya transformasi digital, masyarakat kita menyaksikan bagaimana teknologi informasi dan komunikasi (TIK) justru mempertegas kesenjangan ekonomi yang sudah ada. Bayangkan, di satu sisi, *e-commerce* dan *fintech* membuka pintu peluang bagi UMKM kota untuk berkembang pesat, sementara petani di desa terpencil masih bergulat dengan sinyal internet lemah yang membuat mereka tak bisa jual hasil panen secara online (Hadiyat, 2014). Fenomena ini, yang dikenal sebagai digital divide, bukan sekadar masalah teknis, tapi akar dari ketimpangan pendapatan yang semakin nyata. Menurut data survei APJII 2022, meski penetrasi internet di Indonesia capai 77%, akses berkualitas masih timpang antara Jawa dan wilayah timur, sehingga ekonomi digital lebih banyak menguntungkan urban daripada rural (PUTRI, 2023).

Penyebab utamanya berakar pada infrastruktur yang tak merata. Daerah pedesaan sering kekurangan jaringan fiber optik atau listrik stabil, membuat warga sulit ikut serta dalam *gig economy* seperti Gojek atau *marketplace*. Akibatnya, pekerja informal di sektor pertanian atau kerajinan tak bisa bersaing dengan kompetitor digital dari kota, yang hasilnya memperlebar gap pendapatan antar wilayah. Studi di Kawasan Barat Indonesia (KBI) menunjukkan penggunaan TIK justru menekan ketimpangan, tapi keahlian TIK malah meningkatkannya

karena hanya segelintir orang terampil yang untung besar. Di Kawasan Timur Indonesia (KTI), infrastruktur, penggunaan, dan skill TIK sama-sama tak berdampak signifikan, menandakan urgensi investasi dasar sebelum lonjakan digital. Selain itu, faktor sosial-ekonomi ikut berperan seperti keluarga miskin tak mampu beli smartphone atau bayar kuota, apalagi ikut kursus digital, sehingga siklus kemiskinan berlanjut (Fabela, Z., & Khairunnisa, 2024). Berikut ini dampaknya terasa di berbagai lapisan, seperti:

1. Stratifikasi kelas baru muncul: "digital elite" yang mahir coding atau marketing online meraup keuntungan dari platform global, sementara buruh pabrik kehilangan pekerjaan gara-gara otomatisasi AI. Di pedesaan, digitalisasi ekonomi gagal karena kurangnya pelatihan; petani tak tahu cara pakai aplikasi subsidi pupuk digital, sehingga biaya produksi naik dan daya saing turun.
2. Ketimpangan gender dan usia memburuk
Perempuan di desa jarang akses gadget karena norma budaya, sementara lansia kesulitan adaptasi, membuat mereka terisolasi dari bantuan sosial online selama pandemi.
3. Secara makro, ini menghambat pertumbuhan inklusif; ekonomi digital Indonesia diproyeksi tumbuh 8-10% tahunan hingga 2026, tapi tanpa pemerataan, Gini ratio bisa naik dari 0,38 menjadi lebih parah.

Dalam hal ini, Pemerintah perlu percepat infrastruktur seperti Palapa Ring fase III untuk tutup blank spot di Papua dan NTT, plus program pelatihan massal via Prakerja Digital yang targetkan 10 juta peserta pedesaan. Kolaborasi swasta-pemerintah, seperti inisiatif Google untuk literasi digital gratis, juga krusial. Lebih dari itu, regulasi ekonomi digital harus adaptif: pajak progresif pada raksasa tech untuk dana subsidi akses rural, dan kurikulum sekolah wajibkan skill TIK sejak dini. Pengalaman Singapura dengan *Smart Nation* menunjukkan, saat infrastruktur dan skill sejajar, digitalisasi bisa tekan ketimpangan hingga 15% (Asep Koswara, 2024).

Di Indonesia, tantangan regulasi belum matang membuat ketimpangan sosial kian menganga, tapi dengan komitmen lintas sektor, kita bisa ubah digitalisasi jadi alat pemerataan. Pada akhirnya, digitalisasi seperti pedang bermata dua karena dari potensi besar ciptakan kesejahteraan, tapi jika dibiarkan timpang, ia perkuat jurang miskin dan kaya. Masyarakat perlu dorong kebijakan pro-rakyat agar manfaatnya merata, bukan hanya jadi pesta segelintir orang kaya semata (Kompas, 2024).

d. Pembangunan Inklusif dan Keadilan Sosial di Era Digital

Transformasi digital pada era kontemporer telah menjadi salah satu faktor utama yang memengaruhi arah pembangunan sosial dalam masyarakat modern. Perkembangan teknologi digital tidak hanya menghadirkan perubahan dalam bidang ekonomi, tetapi juga memengaruhi sistem pendidikan, pola interaksi sosial, budaya, hingga proses politik dalam kehidupan masyarakat. Dalam perspektif sosiologi pembangunan, digitalisasi dipahami sebagai bagian dari proses perubahan sosial yang bersifat multidimensional dan tidak dapat dipandang semata-mata sebagai kemajuan teknologi. Perubahan tersebut berkaitan erat dengan dinamika relasi sosial, distribusi akses sumber daya, serta perubahan struktur kekuasaan dalam masyarakat (Sutopo, O. R., Ahmad, N., & Putri, 2022). Oleh karena itu, perkembangan teknologi digital perlu diimbangi dengan kebijakan sosial yang berorientasi pada pemerataan dan keadilan agar transformasi digital tidak justru memperkuat ketimpangan sosial-ekonomi di tengah masyarakat

Dalam konteks pembangunan sosial, digitalisasi pada dasarnya memberikan peluang yang cukup besar bagi peningkatan partisipasi masyarakat. Kehadiran teknologi informasi memungkinkan masyarakat memperoleh akses yang lebih luas terhadap informasi publik, menyampaikan aspirasi sosial, serta terlibat dalam berbagai proses pembangunan secara lebih terbuka. Ruang digital pada akhirnya menciptakan bentuk partisipasi sosial baru yang lebih fleksibel dan demokratis. Namun demikian, peluang tersebut belum sepenuhnya dapat diakses secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat. Ketimpangan akses internet, rendahnya literasi digital, serta keterbatasan infrastruktur teknologi di sejumlah wilayah masih menjadi hambatan dalam mewujudkan pembangunan digital yang inklusif. Akibatnya, kelompok masyarakat yang memiliki kemampuan dan akses teknologi lebih baik cenderung memperoleh keuntungan sosial dan ekonomi yang lebih besar dibandingkan kelompok masyarakat marginal yang mengalami keterbatasan akses digital.

Selain berkaitan dengan akses teknologi, pembangunan di era digital juga menuntut adanya penguatan nilai-nilai sosial dalam pemanfaatan teknologi itu sendiri. Dalam kajian sosiologi pembangunan, kemajuan

teknologi idealnya tidak hanya diarahkan pada peningkatan efisiensi dan produktivitas ekonomi, tetapi juga harus mampu memperkuat solidaritas sosial, etika publik, dan tanggung jawab kolektif masyarakat. Teknologi digital seharusnya menjadi sarana untuk memperluas hubungan sosial dan memperkuat kepedulian sosial, bukan justru mendorong individualisme maupun disintegrasi sosial akibat kesenjangan akses teknologi. Oleh sebab itu, pembangunan digital perlu menempatkan manusia sebagai pusat pembangunan, sehingga orientasi pembangunan tidak hanya bertumpu pada pertumbuhan ekonomi berbasis teknologi, tetapi juga pada peningkatan kualitas kehidupan sosial masyarakat secara menyeluruh (Dos Reis, M. J., & Kusuma, 2025)

Lebih lanjut, pembangunan di era digital membutuhkan perubahan paradigma kebijakan yang tidak hanya memandang teknologi sebagai instrumen ekonomi, tetapi juga sebagai bagian dari pembangunan sosial yang berkeadilan. Pemerintah dan berbagai lembaga pembangunan perlu memperkuat pemerataan infrastruktur digital, peningkatan literasi teknologi, serta pengembangan kapasitas masyarakat agar mampu beradaptasi dengan perubahan sosial yang berlangsung sangat cepat. Upaya tersebut penting dilakukan untuk mencegah munculnya stratifikasi sosial baru berbasis penguasaan teknologi dan informasi. Dalam perspektif keadilan sosial, keberhasilan pembangunan digital tidak cukup diukur melalui tingginya pertumbuhan ekonomi digital semata, tetapi juga dari sejauh mana transformasi digital mampu menciptakan pemerataan kesempatan, mengurangi kesenjangan sosial, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara inklusif dan berkelanjutan (Suseno, J., Asyhari, H., & Saputra, 2025).

Dengan demikian, arah pembangunan di era digital seharusnya berlandaskan pada prinsip inklusivitas, pemerataan akses, dan keadilan sosial. Transformasi digital perlu ditempatkan sebagai sarana untuk memperluas kesempatan ekonomi masyarakat, memperkuat kohesi sosial, serta meningkatkan kualitas hidup secara kolektif. Melalui pendekatan pembangunan yang berorientasi pada manusia, digitalisasi tidak hanya menjadi instrumen modernisasi, tetapi juga dapat berfungsi sebagai kekuatan sosial yang memperkuat fondasi keadilan dan kesejahteraan dalam pembangunan nasional (Fuadi, D. S., Akhyadi, A. S., & Saripah, 2021)

4. Kesimpulan

Transformasi digital telah membawa perubahan besar dalam kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat Indonesia. Perkembangan teknologi digital tidak hanya menciptakan kemudahan dalam aktivitas ekonomi, komunikasi, dan akses informasi, tetapi juga mengubah pola hubungan sosial, struktur pekerjaan, serta dinamika ekonomi masyarakat modern. Kehadiran ekonomi digital melalui berbagai platform berbasis internet membuka peluang baru bagi masyarakat untuk meningkatkan produktivitas dan memperluas akses ekonomi secara lebih cepat dan fleksibel. Namun, di balik perkembangan tersebut, transformasi digital juga memunculkan persoalan baru berupa reproduksi ketimpangan sosial-ekonomi. Perbedaan akses terhadap teknologi, infrastruktur digital, serta kemampuan literasi digital menyebabkan manfaat digitalisasi belum dirasakan secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat. Kelompok masyarakat yang memiliki akses dan penguasaan teknologi lebih baik cenderung memperoleh keuntungan ekonomi yang lebih besar dibandingkan masyarakat yang masih mengalami keterbatasan akses digital, terutama di wilayah pedesaan dan daerah tertinggal. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa digitalisasi dapat memperkuat stratifikasi sosial baru berbasis penguasaan teknologi dan informasi. Dalam perspektif sosiologi ekonomi, transformasi digital tidak hanya dipahami sebagai perkembangan teknologi semata, tetapi juga sebagai proses sosial yang memengaruhi relasi kekuasaan, distribusi sumber daya, dan pola interaksi ekonomi masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan yang lebih inklusif melalui pemerataan infrastruktur digital, peningkatan literasi teknologi, serta penguatan akses ekonomi digital bagi seluruh masyarakat agar transformasi digital dapat menjadi sarana pembangunan sosial-ekonomi yang lebih adil dan berkelanjutan di Indonesia.

Referensi

1. Ahmad taufik, W. murtafi'ah. (2025). Struktur Sosial dan Pola Interaksi : Analisis Perubahan Relasi Kelas dalam Masyarakat Digital. *SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik Dan Hukum*, 4(4), 453–458.
2. Aryani, W. N., Artika, A. I., & Firdaus, A. B. (2025). Digitalisasi dan Pembangunan Sosial : Perspektif Sosiologi terhadap Transformasi Masyarakat di Era Teknologi. *Jurnal Riset Sosial Humaniora Dan Pendidikan*, 3(6)(September), 367–380.
3. Asep Koswara. (2024). Digitalisasi Ekonomi di Pedesaan : Mengkaji Kesenjangan Infrastruktur Digital di Indonesia. *Jurnal Al Azhar Indonesia Seri Ilmu Sosial*, 05(03), 180–187. <https://doi.org/DOI: http://dx.doi.org/10.36722/jaiss.v5i3.3407>
4. Ayu, I. W., Zulkarnaen, Z., & Fitriyanto, S. (2022). Budaya digital dalam transformasi digital menghadapi era Society 5.0. *Jurnal Pengembangan Masyarakat Lokal*, 5(1), 20–25.
5. BPS. (2024). Statistik menurut Subjek. In *Badan Pusat Statistik*. <https://www.bps.go.id/id/statistics-table?subject=565&sortBy=date%2Ctitle&sortOrder=desc%2Casc>

6. Don, S. T. P., Tomohon, B., St, S., & Penginjl, Y. (2024). Transformasi Sosial di Era Digital dan Implikasinya pada Masyarakat Zaman Now (Suatu Kajian Dalam Perspektif Sosiologi Digital) Marianus Muharli Mua Antonius Heatubun Abstract : Abstrak : Pendahuluan Masyarakat zaman now atau masyarakat jaman sekarang (. *Jurnal Pendidikan Pastoral Kateotik*, 2(1), 48–64.
7. Dos Reis, M. J., & Kusuma, A. J. (2025). Peran pemerintah dalam transformasi digital dan implikasinya terhadap cyber democracy di Timor Leste. *Jurnal Sosial Dan Sains*, 5(9), 7087–7096.
8. Fabela, Z., & Khairunnisa, A. (2024). Dampak Kesenjangan Sosial Di Indonesia. *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah*, 3(6), 3158–3164.
9. Fuadi, D. S., Akhyadi, A. S., & Saripah, I. (2021). Systematic review: Strategi pemberdayaan pelaku UMKM menuju ekonomi digital melalui aksi sosial. *Jurnal Pendidikan Luar Sekolah*, 5(1), 1–13.
10. Hadiyat, Y. D. (2014). Kesenjangan Digital di Indonesia (Studi Kasus di Kabupaten Wakatobi). *Jurnal Pekommas*, 17(2), 81–90.
11. Hisyam, C. J., & Lubis, N. P. (2024). *Transformasi Sosial-Ekonomi dalam Era Ekonomi Digital : Analisis Sosiologi Ekonomi terhadap Dinamika Platform Online*. 1(2), 1–13.
12. HUDA, N. (2025). DAMPAK EKONOMI DIGITAL TERHADAP KETIMPANGAN PENDAPATAN DI NEGARA BERKEMBANG : STUDI KASUS INDONESIA. *Jurnal Keislaman Terateks*, 10(1), 85–95.
13. Kominfo. (2022). Laporan Survei Internet APJII 2022. In *Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia*.
14. Kompas, H. (2024). *Digitalisasi dan Pemerataan*. <https://bambangbrodjonegoro.com/blog/digitalisasi-dan-pemerataan/>
15. Kristyanto, V. S., & Jamil, H. (2023). Digital transformation and its impact on inclusive growth: A four-decade experience in Indonesia. *Jurnal Ekonomi & Studi Pembangunan*, 24(2).
16. Muhammad Kamil Jafar N, F. B. (2022). TRANSFORMASI SISTEM EKONOMI PADA ERA DIGITAL4.0 DALAM KAJIAN SOSIOLOGI. *Maqrizi: Journal of Economics and Islamic Economics*, 2(1), 47–55. website: <http://ejournal.iain-manado.ac.id/index.php/maqrizi>
17. Muharrar, A. R., & Wulandari, D. L. (2025). Transformasi Digital dan Reproduksi Ketimpangan Sosial Ekonomi di Wilayah Perkotaan Indonesia. *Transformasi Digital Dan Reproduksi Ketimpangan Sosial Ekonomi Di Wilayah Perkotaan Indonesia*, 3(2), 47–56.
18. News, A. (2024). *APJII Survei Internet Indonesia 2024*. <https://mataram.antaranews.com/berita/322713/apjii-sebut-penetrasi-internet-indonesia-naik-jadi-795-persen#:~:text=Jakarta%20ANTARA%29%20Asosiasi%20Penyelenggara%20Jasa%20Internet%20Indonesia,dari%202023%20yang%20jumlah%20penetrasinya%20sebesar%2078%2C1%20persen.>
19. Nur Afifah Azzahra, M. I. P. N. (2024). DAMPAK PERBEDAAN AKSES TEKNOLOGI TERHADAP KESENJANGAN SOSIAL EKONOMI (The Impact of Differences in Technology Access on Socio-Economic Inequalities). *Jurnal Akademik Ekonomi Dan Manajemen*, 1(4), 422–429.
20. PUTRI, N. Z. (2023). Konsep Kesenjangan Digital dan Faktor yang Mempengaruhi Kesenjangan Digital. *Prosiding FTSP Series*, 398–402.
21. Sudiantini, D., Ayu, M. P., Aswan, M. C. A. S., Prastuti, M. A., & Apriliya, M. (2023). Transformasi Digital: Dampak, Tantangan, Dan Peluang Untuk Pertumbuhan Ekonomi Digital. *Trending: Jurnal Manajemen Dan Ekonomi*, 1(3), 21–30.
22. Suseno, J., Asyhari, H., & Saputra, M. A. (2025). Dampak digitalisasi terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia. *Jurnal Dinamika Sosial Dan Sains*, 2(1), 432–438.
23. Sutopo, O. R., Ahmad, N., & Putri, R. D. (2022). Generasi muda, kapital digital dan kesenjangan sosial di era Industri 4.0. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 11(3), 473–489.
24. Wibowo, G. A., Hanna, Ruhana, F., Arif, F. M., & U. (2023). The influence of social-media on cultural integration: A perspective on digital sociology. *International Journal of Science and Society*, 5(4), 363–375.
25. Yunita, S., & Harahap, R. (2021). Tantangan perubahan sosial pada masyarakat digital Indonesia. *Jurnal Sosioteknologi Nusantara*, 2(3), 201–214.
26. Zair, I. O., Syobah, N. S., & Inayah, S. S. (2025). Social change in the digitalization era of Indonesian consumerism on e-commerce platforms. *Innovative: Journal of Social Science Research*, 5(3), 930–938.